

Budaya Pluralistik Dalam Prespektif Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas Kiriman Saptono, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar

1. Pendahuluan

Dalam arti yang sangat luas, kebudayaan dapat dinyatakan sebagai keseluruhan masalah-masalah sepiritual, material, segi-segi intelektual dan emosional yang beragam, dan memberi watak kepada suatu masyarakat atau kelompok sosial.

Kebudayaan juga dapat pula diartikan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), kemauan (etika), serta perasaan (estetika) manusia dalam rangka perkembangan pribadi manusia; hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan (Bandem, 1995). Para ahli kebudayaan menekankan pentingnya aspek kebudayaan diperhitungkan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1990), adalah kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dirinya dengan belajar. Selanjutnya menurut Koentjaraningrat, ada tujuh unsur kebudayaan secara universal, yaitu; (1). Bahasa, (2). Sistem teknologi, (3). Sistem mata pencaharian atau ekonomi, (4). Organisasi sosial, (5). Sistem pengetahuan, (6). Religi, dan (7). Kesenian.

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan penduduknya terdiri dari kelompok-kelompok suku bangsa yang sangat beragam wujudnya. Jika dipandang dari sudut budaya, di Indonesia terdapat budaya-budaya yang sangat beragam (pluralistik), mulai dari adanya budaya lokal, suatu kebudayaan yang berlaku dalam lingkungan keluarga; kebudayaan daerah, suatu kebudayaan yang disepakati oleh daerah atau suku bangsa tertentu seperti kebudayaan Jawa, Bali, Minang, Sunda, Bugis, Sasak, Dayak, Papua, Madura, dan sebagainya. Wawasan aneka budaya (multikultural) dalam dasawarsa terakhir ini banyak sekali ditampilkan dan dianjurkan dalam berbagai forum (Edi Sedyawati 2002), namun sebenarnya perlu disadari bahwa situasi aneka budaya itu tidak sama di semua negara, meskipun sama-sama mempunyai keanekaragaman budaya. Lebih lanjut Edi Sedyawati, mengemukakan adanya tiga tipe negara dalam hubungannya dengan keanekaragaman budaya yang dikelolanya. *Pertama*, dengan upaya pembangunan imperium (atas sejumlah negara), umumnya kerajaan-kerajaan yang mulanya merupakan negara bebas, namun berada dibawah kekuasaan dan pemantauan kaisar dan pemerintahannya. Mereka mempunyai kebudayaannya masing-masing dan berbeda-beda dengan kebudayaan yang dianut kaisar (contoh kekaisaran di Romawi). Meskipun memiliki kebudayaan-kebudayaan lokal, mereka tidak diberi pengakuan yang nyata. *Kedua*, adalah negara yang terjadi melalui suatu proses kolonisasi dan pendudukan. Negara tipe seperti ini keanekaragaman budaya dapat berkembang secara rumit. (contoh: The United States America, Kanada, dan Australia). Walaupun isu multikulturalisme itu sendiri berasal dari negara-negara tersebut, yang rupanya sangat menyadari akan problematik yang ditimbulkan. *Ketiga*, adalah negara tempat keanekaragaman budaya itu terdapat berdasarkan prinsip penyatuan dan persatuan. Keputusan tersebut dilandasi oleh pengakuan akan adanya cita-cita bersama untuk masa depan, kesamaan latar belakang sejarah, dan kedekatan budaya. (contoh: Indonesia, India, dan Thailand).

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat juga memiliki kebudayaan nasional yang disebut “Kebudayaan Nasional Indonesia” seperti yang tertuang dalam pasal 32 UUD 1945.

Yang menjadi pertanyaan dalam makalah ini adalah, “Mungkinkah kita melakukan pembangunan pariwisata yang berwawasan budaya berbasis komunitas? didalam situasi krisis nasional yang sedang kita alami sekarang ini”.

Di dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembahasan singkat tentang masyarakat Bali Sekarang dan peran pembangunan, pariwisata yang berwawasan budaya, keragaman dan komunitas budaya.

2. Masyarakat Bali

Makin padat dan hetrogenya penduduk pulau Bali. Penduduk pulau Bali tahun 2002 sekitar 3,2 juta (Geriya, 2004) terdiri dari 21 paguyuban etnik nusantara dan pekerja asing dari berbagai negara. Sejak didirikannya Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara tahun 2001, dimana visi dan misinya dengan “terwujudnya masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang mampu mengemban motto: *Dimana Bumi Dipijak, Disana Langit Dijunjung*” .Paling tidak bahwa masyarakat yang menghuni pulau Bali entah itu sifatnya sebagai warga (masyarakat Bali) sementara atau menetap, minimal terdiri dari 21 pelosok daerah-daerah yang ada di nusantara, dan ditambah warga masyarakat pekerja dari berbagai negara asing. Sedangkan untuk warga masyarakat paguyuban etnis nusantara Propinsi Bali yang terdiri dari 21 paguyuban itu, sebagai berikut:

1. Ikatan keluarga Batak (Sumatra Utara)
2. Ikatan Keluarga Minang Saiyo Minang Kabau (Sumatra Barat)
3. Paguyuban Mangle (Jawa Barat)
4. Paguyuban Banyumasan (Jawa Tengah)
5. Ikatan Keluarga Surakarta Hadiningrat (Jawa Tengah)
6. Paguyuban Kesuma/Eks Karesidena Surakarta (Jawa Tengah)
7. Paguyuban Ngeksigondo (Jogjakarta)
8. Ikatan Keluarga Besar Flambomora (NTT)
9. Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua (IMMAPA)
10. Ikatan Keluarga Maluku Bali “IKEMAL”
11. RKSS Kodya Denpasar Makasar Bugis
12. Ikatan Keluarga Toraja (IKAT)
13. Ikatan Keluarga Sangihe Talaud (IKSAT)
14. Ikatan Keluarga Maesa (Minahasa)
15. Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa (PSMTI)
16. Ikatan Keluarga Ombay Alor (NTT)
17. Paguyuban Klong-Bring Alor (NTT)
18. Persaudaraan Warga Tegal (Jawa Tengah)
19. Ketua Forum KKB
20. Kerukunan Keluarga Madura
21. Paguyuban Keluarga Sidoarjo (Jawa Tmur), dan tahun 2004 ditambah
22. Lembaga Adat Kebudayaan Aceh (Laka)

(data dari Badan Informasi dan Telematika Daerah Propinsi Bali tahun 2004).

Dengan keragaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk keragaman (pluralistik) budaya daerah, merupakan hal wajar dan bahkan

anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Anugerah Tuhan dapat dipastikan berpeluang positif dan negatif, sehingga hal itu perlu dikelola melalui usaha pengenalan, penghayatan dan penghargaan dengan mengemangkan dialog-dialog serta apresiasi budaya sehingga mampu mewujudkan situasi dan kondisi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada akhirnya untuk menghindari disintegrasi bangsa dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan seberapa jauhkah kiprah forum paguyuban ini ikut andil didalam meningkatkan pembangunan Bali yang berwawasan budaya? Dan juga jika paguyuban-paguyuban ini sebagai wadah warga masyarakatnya, mungkin bisa memberikan andil didalam membantu sensus kependudukan di Bali dan khususnya Denpasar. Untuk menjawab pernyataan tersebut tentu hal ini perlu adanya penelitian yang serius. Memang secara empiris saya masih melihat adanya kesemrawutan didalam hal kependudukan di Denpasar. Lepas dari itu diera globalisasi ini juga membawa kota-kota di Bali, seperti; Denpasar, Badung, Gianyar, sebagai pusat urban. Urbanisasi dimana masyarakat berbondong-bondong dari desa ke kota untuk memperbaiki nafkah. Meskipun urbanisasi tidak selalu modernisasi (Robert H.Lauer, 2003), tetapi proses modernisasi selalu ditandai oleh urbanisasi – dimanapun poses modernisasi itu terjadi, dan singkatnya terdapat hubungan positif dan nyata antara urbanisasi, industrialisasi, dan pendapatan perkapita. Dan lebih lanjut dinyatakan bahwa semua masyarakat modern tergantung pada urbanisasi, dan masyarakat modern ditandai oleh proses urbanisasi (*ibid*, 454). Urbanisasi dapat membantu perkembangan ekonomi; tetapi berdasarkan keadaan tertentu, urbanisasi pun dapat menghalangi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terjadi bila urbanisasi dapat berlangsung terlalu cepat sehingga dapat menimbulkan masalah ekonomi, politik dan sosial yang gawat yang untuk menyelesaikannya menyita banyak waktu, tenaga dan sumber daya untuk pembangunan ekonomi (*ibid*, 456

3. Pembangunan dan nilai budaya

Persoalan kompleks disekitar pembangunan bangsa dapat kita pahami bersama yaitu persoalan daya guna, keadilan, dan kesejahteraan yang belum merata. Ada kelemahan yang mewarnai konsep pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan konsep *tricking down effect* (Tjatra, 2004), dan muncullah berbagai konsep pembangunan alternatif, seperti *ecodevelopment* dan *sustainable development*. Pendekatan ekologi – *ecodevelopment* memandang keberlanjutan pembangunan dari sudut sejarah kebudayaan masyarakat tertentu, keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat biasa, *ethno-ecology*, dan keadaan alam yang mewarnai *ecosistem* setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang tinggal dalam lingkungannya.

Budaya modern membedakan dan menyepakati berbagai hubungan politik, ekonomi, budaya antara saat ini dan masa depan (Tian Feng, 1999), untung dan rugi lewat perubahan hari ini dan besok dari strategi berlawanan. Oleh sebab itu, uji coba penting saat ini adalah, memberikan masyarakat mempelajari dan menganalisa “modern dan tradisional”, “seni dan teknologi”, “jiwa dan tubuh”, “materi dan ruh”, dari sisi positif dan negatif sains dan teknologi modern. Karena lewat jalan berlawanan kita akan melihat dengan jelas keindahan dan keburukan, kebaikan dan kejelekan, tinggi dan rendah, puas dan serakah, jauh dan dekat, untung dan rugi, dan lain-lain, untuk mengetahui segalanya. Manifesto kebudayaan pluralistik juga merupakan salah satu dari

kebudayaan tradisional, demikian juga manifesto ekonomi dan politik pluralistik. Dengan demikian persentuhan antar budaya tidak saja melampaui batas-batas geografis, tetapi juga bersilangan dalam dimensi waktu – bergerak kemasa lampau dan masa depan.

4. Pariwisata Budaya

Banyak pakar budaya yang menganggap bahwa industri pariwisata berdampak kurang baik, bahkan merusak perkembangan seni pertunjukan di negara berkembang (Soedarsono,1999). Industri pariwisata dikatakan merusak, mendesakralisasikan, mengkomersialisasikan seni pertunjukan tradisional, dan sebagainya. Lebih lanjut Soedarsono dalam hasil penelitiannya, bahwa dalam menilai kemasn seni pertunjukan wisata digunakan teori serta konsep yang benar dan cocok, jelas industri pariwisata memperkaya perkembangan seni pertunjukan Indonesia

Kebudayaan ekspresif, seperti tarian, musik, dan teater, sekarang ini menjadi bentuk-bentuk hiburan dan komoditi komersial.

4. Peluang alternatif lewat menghormati keragaman dan komunitas budaya.

Secara umum, tradisi-tradisi budaya di Indonesia mengutamakan keselarasan hubungan-hubungan orang-perorang dalam masyarakat yang dilandasi prinsip-prinsip rukun dan hormat (Soehardi, 2001:3-26). Artikulasi keselarasan itu berbeda dari masyarakat suku bangsa satu dengan lainnya, tetapi prinsip-prinsip kerukunan yang diwujudkan dalam aktivitas gotong-royong dapat dijumpai di semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Perjalanan perkembangan suatu kebudayaan dan masyarakat dalam sejarahnya tidak pernah tertutup dari persinggungan budaya-budaya lain. Dimana kontak-kontak budaya regional, atau antar benua sudah berlangsung dari zaman awal sejarah samapi sekarang (melalui perkembangan komunikasi global seolah-olah antar budaya kini menjadi tanpa batas). Kalau dilihat dari teori evolusi, maka perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat dipandang sebagai suatu '*progress*' yang sejalan dengan proses evolusi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dengan demikian proses perubahan semacam ini dapat dialami hampir semua bangsa-bangsa di dunia, termasuk suku-suku bangsa di Indonesia; Jawa, Bali, Sunda, Minang, Batak, dan yang lainnya.

Kontak masyarakat Bali dengan budaya luar bukan sesuatu hal baru, karena telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai 'pengaruh luar' dalam adat budaya Bali, seperti pengaruh India, Cina, Arab dan – tentu saja – Jawa (MPLA, 1991; Mantra, 1993; Barth, 1993, dalam Pitana, 1994:156-157). Selanjutnya intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayaan luar meningkat secara dramatik pada paruh kedua abad ini, yang terkait erat dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dibidang komunikasi dan transportasi, serta keberhasilan Bali menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang terkenal di dunia (*ibid*, 157).

Dari prespektif sejarah, kebudayaan Bali memiliki keterbukaan dengan kebudayaan luar dan memperlihatkan sifat fleksibel dan adaptif. Potensi ini penting artinya untuk menghindari perbenturan antar budaya. Jika dilihat dari tatanan sejarah nasionalisme Indonesia, juga dapat dipahami bahwa konsep wawasan kebangsaan adalah "persatuan dan kesatuan". Seperti dari pernyataan Presiden Soeharto, pada Dharma Santi Penyepian 1997, dalam Dewa Atmaja (2002), "bahwa dari kenyataan keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat dan budaya di Indonesia yang penting bukan masing-masing suku, bahasa, atau budayanya, akan tetapi keseluruhan suku bangsa, adat-istiadat, budaya,

dan bahasanya. Jadi itulah hakekat dari wawasan kebangsaan “Persatuan dan kesatuan”. Lebih lanjut Dewa (2002), melihat dua aspek strategis yang perlu diangkat dari wawasan kebangsaan. Pertama, Nation Building dalam suatu masyarakat bangsa yang pluralistik atau majemuk merupakan suatu keharusan dalam menjaga keutuhan negara-bangsa (nation state) Indonesia. Secara konstitusional kita memiliki landasan yang kuat bagi integrasi nasional yaitu Ideologi Pancasila. Kedua, Manusia juga merupakan faktor strategis, yaitu kajian difokuskan pada esensi manusia Indonesia memahami paham kebangsaan dalam zaman yang berubah cepat. Dalam kajian antropologi dan sosiologi, maka dapat digambarkan sisi yang menonjol pada manusia Indonesia adalah keterkaitannya yang kuat dengan kesatuan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal itu maka perlu dipahami bahwa kuatnya kebersamaan dalam persamaan kebangsaan tumbuh karena (1) persamaan nasib pada masa lampau, (2) persamaan kepentingan masa kini, (3) persamaan aspirasi kemasa yang akan datang. Hasrat yang kuat akan kebersamaan kini memerlukan perawatan yang sekasama.

Dalam membina budaya pulralistik di tanah air (Bandem, 1995), mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kebijaksanaan dan arah perkembangan kebudayaan nasional. Salah satu faktor tersebut adalah: (1) semakin intensifnya interaksi sosial budaya antara sesama warga negara Indonesia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam. Dimana tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan adalah diarahkan untuk memberi wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jatidiri dan kepribadian bangsa.

Bagaimana dengan pembinaan dan pengembangan kesenian sebagai bagian dari kebudayaan? Secara spesifik, pembinaan dan pengembangan kesenian semestinya berada dalam koridor visi sebagai berikut; bahwa kesenian diperlukan untuk keseimbangan hidup dan perdamaian dunia; kesenian sebagai pelestari kebudayaan; kesenian dihaapkan dapat melahirkan seniman intelektual, kreatif, profesional, dan mampu menjadi subyek pembangunan; terwujudnya kesenian Indonesia yang memuat sepirit budaya lokal, daerah, nasional, dan internasional; dan kesenian sebagai penghasil devisa negara dan daerah serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (Bandem, 2003:9). Demikian juga Geriya (2004) didalam menawarkan solusi strategis visi – misi – politik dan straegi kebudayaan Bali ke depan yang perlu diemban oleh lembaga-lembaga kebudayaan dan komuniti Bali. Visi, mengembangkan kebudayaan Bali berkelanjutan kearah kemajuan adab dan budaya, sebagai dasar jatidiri dan sumber kesejahteraan yang terbuka secara lokal, nasional, dan internasional. Misi, (1) pembangunan melalui kreasi, inovasi, adaptasi budaya, agar tetap hidup dan eksis berkelanjutan dalam konteks lingkungan yang berubah, (2) pelestarian, (3) pemberdayaan terhadap SDM dan komuniti budaya, dan (4) perdamaian, persatuan dan kemanusiaan melalui festival seni, dialog seni dan diplomasi kebudayaan. Lebih lanjut Geriya, bahwa politik kebudayaan ke depan adalah menyadarkan dan mengimplementasikan wawasan budaya dalam pembangunan Bali dengan memfungsikan kebudayaan sebagai potensi, pendekatan dan tujuan yang berorientasi pada pengokohan jatidiri, perekat kesatuan, toleransi lintas budaya dan indikasi peradaban Bali dalam konteks lokal, nasional dan dunia dengan ditopang SDM berkualitas. Sedangkan tiga opsi strategi kebudayaan jangka panjangnya; salah satunya yaitu “progresif”, dimana mengedepankan upaya pengembangan budaya secara lintas

sektor (budaya, pariwisata, teknologi, pendidikan), lintas bidang (politik, hukum, ekonomi) dan lintas budaya sebagai sumber kesejahteraan dan media persahabatan.

6. Penutup

Gagasan tentang warisan cultural dipandang sebagai aspek penting yang harus diindungi dalam rangka mencari identitas nasional dilandasi oleh hasrat sederhana untuk mengabdikan kegemilangan masa silam. Sebagaimana disebutkan di muka, pluraristik (keragaman) budaya khususnya seni pertunjukkan yang dimilikinya dapat sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata berwawasan budaya.

Selama ini berbagai paguyuban etnis Nusantara yang terdapat di Bali khususnya Denpasar memiliki potensi budaya asalnya namun keberadaannya antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat belum bisa dirasakan, sehingga keragaman budaya khususnya seni pertunjukan daerahnya belum terjamah dan dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan pariwisata berwawasan budaya.

Dengan demikian perlu adanya interaksi dan dialog-dialog yang intensif antara paguyuban etnis nusantara dengan lembaga formal khususnya pemerintah daerah dan organisasi-organisasi sosial lainnya seperti sanggar seni, sekaa-sekaa guna mendukung visi dan misi pembangunan daerah yang berwawasan budaya.

Daftar Pustaka

As, Sumajati, (ed), 2001

Manusia Dan Dinamika Budaya: Dari Kekerasan Sampai Baratayuda.
Yogyakarta: Fak. Sastra UGM dengan BIGRAF Publishing.

Bandem, I Made, 2003

"Pembangunan Bangsa Dari Prespektif Manajemen Kebudayaan"
(disampaikan dalam Orasi Ilmiah pada Diesnatalis xxxvi dan Wisuda xv).
STSI Denpasar.

Feng, Tian, 1999

Pencarian Makna Perubahan: Kajian Awal Tentang Modernitas dan Tradisi, dan Kebangkitan Budaya Pluralistik. (pada Keragaman dan Silang Budaya.dalam Jurnal SPI Th. Ix-1998/1999). Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.

Geriya, I Made, 2004

Visi dan Strategi Kebudayaan Bali ke Depan dan Penjabaran ke Dalam Misi dan Tujuan PKB. (dalam MUDRA: Jurnal Seni Budaya Vol.14 No. 1 Januari 2004). ISI Denpasar.

Koentjaraningrat, 2004

Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia. Cet. Ke 20. Jakarta: Djambatan.

Lauer, Hobert H, 2003

Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Pitana, I Gede dan Putu G Gayatri, 2005
Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Soedarsono, R.M, 1999
Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Suwarsono dan Alvin Y.So, 1990
Perubahan Sosial dan Pembangunan (Edisi Revisi). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Tjatra, I Wayan, 2004
“Eksistensi Kearifan Local Dalam Pembangunan Daerah Bali”. Bahan matrikulasi program Pascasarjana (S2) Kajian Budaya Unud.